



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2018



**DINAS PERHUBUNGAN
KAB. NUNUKAN**



KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan perbaikan tata kelola dan manajemen kinerja pemerintahan, melalui Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja yang mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan uang rakyat yang dibelanjakannya. Dalam SAKIP, keberhasilan instansi pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran dan bukan dari keberhasilan menghabiskan anggaran tersebut.

Sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2018 ini disusun dengan menyajikan berbagai capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perhubungan, Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dalam melayani masyarakat. Keberhasilan yang dicapai di Sektor Perhubungan tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh *stakeholders* dan partisipasi masyarakat.

Nunukan, Februari 2019

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nunukan,



ABDI JAUHARI, N. ST
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19780430 200112 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.5 Struktur Organisasi	5
1.6 Aspek Strategis Dinas Perhubungan	9
1.7 Sistematika Penyajian LKjIP Tahun 2018	11
BAB II Perencanaan Kinerja.....	13
2.1 Perjanjian Kinerja 2018	13
BAB III Akuntabilitas Kinerja	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2 Realisasi Anggaran	34
BAB IV Penutup	38
4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2018	38
4.2 Langkah-Langkah di Masa Mendatang Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja	38
Lampiran I : Perjanjian Kinerja T.A 2018	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah PNS / CPNS Dinas Perhubungan Kab.Nunukan Tahun 2018 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel I.2	Jumlah PNS / CPNS Dinas Perhubungan Kab.Nunukan Tahun 2018 Berdasarkan Pangkat /Golongan	6
Tabel I.3	Jumlah PNS Dinas Perhubungan Kab.Nunukan Tahun 2018 Yang Menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional	7
Tabel I.4	Daftar Prasarana Dinas Perhubungan Tahun 2018	8
Tabel II.1	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja	13
Tabel II.2	Program dan Anggaran 2018	14
Tabel III.1	Target dan realisasi kinerja TA 2018	16
Tabel III.2	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018, Sasaran Startegis I	17
Tabel III.3	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir, Sasaran Startegis I	17
Tabel III.4	Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan 2016-2021, Sasaran Startegis I.....	18
Tabel III.5	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018, Sasaran Startegis II	21
Tabel III.6	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir, Sasaran Startegis II	22
Tabel III.7	Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan 2016-2021, Sasaran Startegis II.....	23
Tabel III.8	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018, Sasaran Startegis III	25
Tabel III.9	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir, Sasaran Startegis III	27
Tabel III.10	Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan 2016-2021, Sasaran Startegis III.....	27

Tabel III.11 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018, Sasaran Startegis IV	29
Tabel III.12 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir, Sasaran Startegis IV	32
Tabel III.13 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan 2016-2021, Sasaran Startegis IV.....	30
Tabel III.14 Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.....	33
Tabel III.15 Realisasi Anggaran Tahun 2018.	34
Tabel III.16 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018.	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Transportasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Ada dua sisi dimana sektor transportasi dapat berperan dalam menunjang pembangunan. Disatu sisi transportasi diperlukan untuk memberikan jawaban terhadap pembangunan yang sedang berlangsung (*how to answer development*) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan. Sedangkan pada sisi yang lain sektor transportasi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merangsang pertumbuhan pembangunan (*how to initiate development*).

Kewajiban Pemerintah (baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) di sektor transportasi tidak berbeda dengan sektor lainnya seperti pendidikan dan kesehatan saat ini terhambat masalah minimnya anggaran yang tersedia. Sasaran pajak dan retribusi sektor transportasi saat ini belum dapat sepenuhnya dikembalikan untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur, sistem dan jaringan transportasi karena masih banyak sektor prioritas yang lebih mendukung pembangunan wilayah.

Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan di Kabupaten Nunukan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perangsang pertumbuhan ekonomi dan mendukung berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk bisa menjalankan peran tersebut, pembangunan transportasi perlu dilakukan secara terintegrasi antar moda transportasi darat, laut dan udara yang mengacu kepada Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK), Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) dan Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) yang merupakan keharusan sebagai pedoman pembangunan perhubungan secara nasional serta RPJMD Kabupaten Nunukan 2016 – 2021.

Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dalam kedudukannya sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dituntut untuk dapat mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan daerah dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Nunukan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan tahun 2018 disusun dalam rangka melaporkan kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan. Laporan ini juga dapat menentukan atau mengubah arah, kebijaksanaan, perencanaan dan evaluasi serta bahan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Teknis Instansi Pemerintah, pada lampiran II disebutkan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sedangkan tujuan pelaporan kinerja yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggara negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Selain itu dari LKjIP ini dapat diketahui pula pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan sesuai dengan target dan sasaran strategis. LKjIP ini merupakan sistem pengendalian manajemen disektor publik yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan tahun 2018 kepada seluruh stakeholder dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.3 DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan litimate untuk mendukung berlangsungnya pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. LKjIP ini disusun dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan;
14. Surat Bupati Nunukan Nomor 362/050-ORG/XII/2018, Perihal : Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.4.1 Tugas Pokok Dinas Perhubungan

Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1.4.2 Fungsi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- 3) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kepelabuhanan dan penerbangan;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang angkutan pelayaran;
- 6) Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- 7) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 8) Pembinaan kelompok jabatan Fungsional;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perhubungan Darat, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - 2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Bidang Perhubungan Perairan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran; dan
 - 2) Seksi Angkutan Perairan.
- e. Bidang Prasarana Perhubungan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Prasarana Perhubungan Darat dan Penerbangan; dan
 - 2) Seksi Prasarana Perhubungan Perairan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2017 memiliki jumlah PNS/CPNS Sebanyak 78 Orang per 31 Desember 2017.

Tabel 1.1
Jumlah PNS/CPNS Dinas Perhubungan Kab. Nunukan Tahun 2018
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	Persentase
		PNS	CPNS		
1.	SD	1	0	1	1,33
2.	SMP	1	0	1	1,33
3.	SMA	29	0	29	38,66
4.	D1	0	0	0	0,00
5.	D2	0	0	0	0,00
6.	D3	16	0	16	21,33
7.	D4/S1	25	0	25	33,33
8.	S2	3	0	3	4
Jumlah		75	0	75	100

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Dishub

Tabel 1.2
Jumlah PNS/CPNS Dinas Perhubungan Kab. Nunukan Tahun 2018
Berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	Persentase
		PNS	CPNS		
1.	I a	0	0	0	0,00
2.	I b	1	0	1	1,33
3.	I c	0	0	0	0,00
4.	I d	1	0	1	1,33
5.	II a	0	0	0	0,00
6.	II b	9	0	9	12
7.	II c	12	0	12	16
8.	II d	9	0	9	12

No	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	Persentase
		PNS	CPNS		
9.	III a	18	0	18	24
10.	III b	8	0	8	10,66
11.	III c	9	0	9	12
12.	III d	5	0	5	6,66
13.	IV a	1	0	1	1,33
14.	IV b	2	0	2	2,66
Jumlah		75	0	75	100

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Dishub

Tabel 1.3
Jumlah PNS Dinas Perhubungan Kab. Nunukan Tahun 2018
Yang Menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan Struktural	Jumlah PNS
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kasi/ Kasubag	13
5.	Kasubag di UPT	5
6.	Jabatan Fungsional	0
Jumlah		23

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Dishub

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung kantor, bangunan prasarana perhubungan dan sarana mobilitas serta sarana lainnya yang dioptimalkan penggunaannya.

Dinas Perhubungan memiliki sarana yang terdiri dari 140 item barang dengan kondisi yang relative baik dan dipergunakan untuk melaksanakan tugas, kegiatan dan fungsi. Adapun prasarana yang dikelola tercantum dalam tabel berikut :

Tabel I.4
Daftar Prasarana Dinas Perhubungan Tahun 2018

No.	Jenis Tanah	Luas		Status	Keterangan
		Tanah	Bangunan		
1	Tanah Bangunan Terminal Darat	10.715,00 M ²	-	Hak pakai	Terminal Desa Mansalong
2	Tanah Bangunan Terminal Darat	11.073,00 M ²	-	Hak Pakai	Terminal Mansalong
3	Tanah Bangunan Terminal Laut	3.930,00 M ²	-	Hak Pakai	Pelabuhan Laut Sebatik
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	39.025,00 M ²	-	Hak Pakai	Kantor Dishub Lama (Sekarang Capil)
5	Tanah Bangunan Dermaga	15.551,90 M ²	-	Hak Pakai	Pelabuhan ASDP
6	Tanah Bangunan Dermaga	-	-	Hak Pakai	-
7	Tanah Area Landasan Pacu Bandara Nunukan	14.325 m ²	-	Milik Pemda	Bandara Nunukan
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	39.025,00 M ²	Milik Pemda	Kantor Dishub (Sekarang)
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	-	-
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	-	-
11	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	-	-	Milik Pemda	Gedung PKB
12	Gedung Pos Jaga Permanen	-	-	-	Pos Jaga, Tambatan dermaga dan rehab jeramba nunukan
13	Gedung Pos Jaga Permanen	-	-	-	Pos Jaga Lalo Salo
14	Bangunan Gudang Terminal/pelabuhan/bandara permanen	-	-	-	Dermaga Desa labang Kec. Lumbis
15	Gedung VIP Bandara Nunukan	-	-	Milik Pemda	Bandara Nunukan
16	Dermaga ASDP	-	-	Milik Pemda	Lumbis, Sembakung, Lalo Salo, Mantikas, Sei Jepun
17	Bangunan Gedung Halte	-	-	Milik Pemda	Kabupaten Nunukan (10 titik)
18	Bangunan Gedung Kantor UPTD	-	-	Hak Pakai/ Sewa	Krayan, Sebuku, Lumbis
19	Bangunan Gudang Kantor	-	-	Hak Pakai/Sewa	Nunukan Selatan
20	Bangunan Gedung Terminal dan Pelabuhan Laut	-	-	Pinjam Pakai/ Milik Provinsi	PLBL Liem Hie Djung
21	Terminal Pelabuhan/ Dermaga Penyeberangan	-	-	Milik Pemda	Terminal Bambang

No.	Jenis Tanah	Luas		Status	Keterangan
		Tanah	Bangunan		
22	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen			Milik Pemda	Kanopi PLBL Liem Hie Djung
23	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen			Milik Pemda	Kanopi Pelabuhan Sei Jepun
24	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen			Milik Pemda	Garasi Kantor Dishub
25	Gapura			Milik Pemda	Gapura PLBL

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Dishub

1.6 ASPEK STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

Dalam rangka untuk mempermudah memahami isi laporan ini, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Nunukan Tahun 2018 ini akan dijabarkan aspek strategis serta permasalahan utama Dinas Perhubungan, Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

1.6.1 Aspek Strategis

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun strategi yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan adalah :

1. Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur;
3. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang berkualitas, merata dan terintegrasi secara berkelanjutan; dan
4. Mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas, terjangkau, mudah diakses, aman dan nyaman.

1.6.2 Isu Strategis (*Strategic Issued*)

Permasalahan sektor perhubungan di Kabupaten Nunukan ditimbulkan oleh berbagai faktor ataupun beberapa faktor yang saling berkaitan. Sebagian besar terkait rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Nunukan.

Adapun pokok-pokok permasalahan di sektor perhubungan yang berhasil teridentifikasi adalah:

1. Belum cukupnya dan meratanya kompetensi SDM sektor transportasi yang berpengaruh pada performa sektor transportasi secara keseluruhan. Permasalahan ini dipengaruhi oleh :
 - a. Kebijakan rekrutmen dan penempatan SDM yang belum optimal;
 - b. Masih terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten untuk ditugaskan pada prasarana perhubungan yang telah tersedia/ terbangun;
 - c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di wilayah terpencil yang menghambat pelaksanaan tugas.
2. Belum tersedianya infrastruktur transportasi yang baik di seluruh wilayah kabupaten terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal. Permasalahan ini dipengaruhi oleh :
 - a. Luasnya wilayah Kabupaten Nunukan dengan kondisi geografis yang terdiri dari banyak sungai dan dataran tinggi, sehingga sangat mempengaruhi kemampuan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penyediaan infrastruktur transportasi yang baik;
 - b. Biaya penyediaan lahan dan status lahan yang belum jelas.
3. Belum tertatanya secara baik pengoperasian moda transportasi darat dan perairan yang disebabkan terbatasnya peraturan dan rendahnya kualitas SDM. Permasalahan ini dipengaruhi oleh :
 - a. Usaha transportasi darat maupun perairan masih dioperasikan dengan manajemen secara tradisonal. Hal ini kurang sesuai dengan peraturan-peraturan teknis maupun operasional yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan untuk menjamin terpenuhinya faktor keselamatan transportasi. Peraturan menuntut moda transportasi harus dioperasikan dengan badan hukum dengan manajemen profesional.
 - b. Belum berjalan dengan baiknya peraturan yang sudah ada dan belum cukupnya peraturan terkait perlintasan / rute, trayek dan manajemen lalu lintas transportasi publik lainnya.
4. Rendahnya penggunaan transportasi umum. Permasalahan ini dipengaruhi oleh :
 - a. Buruknya kondisi fisik sarana transportasi umum sehingga keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi umum menurun;
 - b. Pengelolaan manajemen jasa angkutan yang kurang profesional dan manajemen transportasi angkutan yang belum optimal. Hal ini

- berpengaruh pada performance sarana, biaya operasional, tarif angkutan umum dan kepuasan pengguna jasa angkutan;
- c. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi.

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP TAHUN 2018

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA 2018

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan telah menandatangani perjanjian kinerja tahun 2018 dengan Bupati Nunukan yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja telah mengacu pada Renstra tahun 2016 - 2021 dalam dokumen Penetapan Kinerja 2018, ditetapkan target indikator kinerja dari sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel II.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya infrastruktur transportasi yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Nunukan terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal	Prosentase ketersediaan pelabuhan laut, sungai dan terminal	80%
2.	Tersedianya moda transportasi yang aman, layak, efisien dan berkelanjutan	Prosentase angkutan darat dan laut yang layak	75%
3.	Terciptanya sistem dan jaringan transportasi yang baik dan selaras dengan kebijakan sistem dan jaringan transportasi regional dan nasional serta internasional	Prosentase keselamatan angkutan darat dan perairan	98%
4.	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas di sektor transportasi	Prosentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya.	60%

Target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut diatas akan diupayakan untuk tercapai melalui pelaksanaan Program sebagai berikut :

Tabel II.2
Program dan Anggaran 2018

No.	Program	Anggaran
1.	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	50.000.000,00
2.	DAK Afirmasi Bidang Transportasi	830.000.000,00
3.	Peningkatan Pelayanan Perhubungan	382.795.550,00
4.	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	54.542.000,00
5.	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1.539.532.500,00
6.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	47.960.000,00
Jumlah		2.904.650.050,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

Pengukuran Kinerja merupakan inti dari akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan. Pengukuran tersebut merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa *input, output dan outcome*.

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan dilakukan dengan menggunakan indikator kuantitatif, agar pada pelaksanaannya dapat lebih terukur dan dapat dievaluasi dengan mudah.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran strategis diberlakukan nilai disertai makna nilai tersebut dengan menggunakan skala lima, antara lain :

- 91% s.d. 100% = Sangat Tinggi
- 76% s.d. <90% = Tinggi
- 66% s.d. <75% = Sedang
- 51% s.d. <65% = Rendah
- < 50% = Sangat Rendah

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala lima tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan namun digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan dapat disajikan dengan cara melakukan pengukuran kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Target dan realisasi kinerja TA 2018

Tabel III.1

Sasaran Strategis/IKU		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
(1)		(2)	(3)	(4)	(5=4/3x100)
Sasaran 1 : Tersedianya infrastruktur yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Nunukan terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal					
IKU	Prosentase ketersediaan pelabuhan laut, sungai dan terminal	%	80	95,65	119,56
Sasaran 2 : Tersedianya moda transportasi yang aman, layak, efisien dan berkelanjutan					
IKU	Prosentase angkutan darat dan laut yang layak	%	75	76,75	102,33
Sasaran 3 : Terciptanya sistem dan jaringan transportasi yang baik dan selaras dengan kebijakan sistem dan jaringan transportasi regional dan nasional serta internasional.					
IKU	Prosentase keselamatan angkutan darat dan perairan	%	98	79,60	81,22
Sasaran 4 : Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas di sektor transportasi					
IKU	Prosentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya.	%	60	56,67	94,45

Dari uraian tabel III.1 tentang sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) tahun 2018 di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, dapat disajikan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- ❖ **Sasaran Strategis 1 : Tersedianya infrastruktur yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Nunukan terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal**

Sasaran strategis “Tersedianya infrastruktur yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Nunukan terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal” merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **Meningkatkan keterjangkauan dan konektifitas pelayanan transportasi terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal; dan Meningkatkan pelayanan transportasi yang aman, handal, terjangkau, tertib dan berkelanjutan.** Sasaran ini didukung oleh Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Capaian sasaran “Tersedianya infrastruktur yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Nunukan terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal” tahun 2018 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja TA 2018

Tabel III.2

	Sasaran Strategis/IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3x100)
Sasaran 1 : Tersedianya infrastruktur yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Nunukan terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal					
IKU	Prosentase ketersediaan pelabuhan laut, sungai dan terminal	%	80	95,65	119,56

Dari uraian tabel III.2, tergambar bahwa Sasaran Strategis di atas diukur dengan menggunakan indikator “Prosentase ketersediaan pelabuhan laut, sungai dan terminal”. Target ditetapkan sebesar **80%** dengan realisasi sebesar **95,65%** sehingga capaian kinerja sasaran di atas adalah sebesar **119,56%**.

Untuk mencapai sasaran strategis di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan melaksanakan 1 (satu) program. Program tersebut didukung oleh kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai yang berlokasi di Desa Labang Kec. Lumbis Ogong. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan indikator di atas adalah sebagai berikut :

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara jumlah Pelabuhan Laut, Sungai dan Terminal dengan Jumlah Kebutuhan Prasarana Perhubungan. Pada tahun 2018, berhasil dibangun **1 (satu)** unit dermaga sungai sehingga total jumlah Pelabuhan Laut, Sungai dan Terminal yang ada di Kabupaten Nunukan sebanyak **22 (dua puluh dua)** unit. Adapun kebutuhan prasarana perhubungan sampai dengan akhir periode Renstra ditargetkan sebanyak **23 (dua puluh tiga)** unit.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir.

Tabel III.3

	Sasaran Strategis/IKU	Satuan	Realisasi	
			2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Tersedianya infrastruktur yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Nunukan terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal				
IKU	Prosentase ketersediaan pelabuhan laut, sungai dan terminal	%	91,30	95,65

Tabel III.3 di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 realisasi indikator sebesar 91,30% sedangkan realisasi pada tahun 2018 tercatat sebesar 95,65. Dengan demikian terjadi peningkatan realisasi kinerja sebesar 4,35%.

Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan 2016-2021.

Tabel III.4

Sasaran Strategis/IKU		Satuan	Target 2021	Realisasi 2018
(1)		(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Tersedianya infrastruktur yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Nunukan terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal				
IKU	Prosentase ketersediaan pelabuhan laut, sungai dan terminal	%	100	95,65

Dari uraian tabel III.4 tentang perbandingan antara realisasi kinerja T.A 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan 2016-2021, tergambar bahwa realisasi kinerja tahun 2018 sudah mendekati capaian 100 persen.

Tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional karena Dinas Perhubungan belum mempunyai Standar Pelayanan Minimal.

- ❖ Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis I adalah :
 1. Adanya komitmen dan dukungan serta kerjasama yang baik oleh para stake holder terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
 2. Adanya dukungan anggaran melalui alokasi dana khusus (DAK) Afirmasi Transportasi Tahun Anggaran 2018.

- ❖ Hambatan/Masalah :
 1. SDM yang memiliki kualifikasi teknis terbatas.
 2. Dukungan anggaran APBD II terbatas.

- ❖ Strategi / upaya pemecahan masalah:

Strategi dan kebijakan yang diambil terkait kendala yang ada adalah :

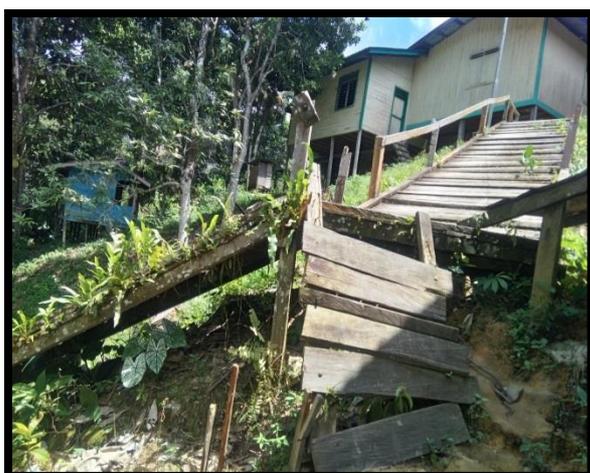
 1. Mengajukan usulan penambahan personil yang memiliki kualifikasi teknis ke Kantor BKPSDM Kabupaten Nunukan.
 2. Meminta pendampingan tenaga ahli dari Dinas Pekerjaan Umum

3. Meminta dukungan dan pendampingan dari APIP dan TP4D dalam pelaksanaan pembangunan fisik.
4. Mengusulkan dana pendampingan dari APBD Kab. Nunukan TA 2018

❖ Dokumentasi ;

KEGIATAN PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU DESA LABANG KEC. LUMBIS OGONG (DAK AFISRMASI TRANSPORTASI 2018)

A. Sebelum Pembangunan



B. Setelah Pembangunan



- ❖ **Sasaran Strategis 2 : Tersedianya moda transportasi yang aman, layak, efisien dan berkelanjutan.**

Sasaran strategis “Tersedianya moda transportasi yang aman, layak, efisien dan berkelanjutan” merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **Meningkatkan keterjangkauan dan konektivitas pelayanan transportasi terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal; dan Meningkatkan pelayanan transportasi yang aman, handal, terjangkau, tertib dan berkelanjutan.** Sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan dan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor .

Capaian sasaran “Tersedianya moda transportasi yang aman, layak, efisien dan berkelanjutan” tahun 2018 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja TA 2018

Tabel III.5

Sasaran Strategis/IKU		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
(1)		(2)	(3)	(4)	(5=4/3x100)
Sasaran 2 : Tersedianya moda transportasi yang aman, layak, efisien dan berkelanjutan					
IKU	Prosentase angkutan darat dan laut yang layak	%	75	76,75	102,33

Dari uraian tabel III.5 tentang perbandingan antara target dan realisasi kinerja T.A 2018 tergambar bahwa capaian sasaran strategis diatas diukur menggunakan Indikator Kinerja Prosentase angkutan darat dan laut yang layak dengan target **75%**. Adapun realisasi yang berhasil dicapai sebesar **76,75%** sehingga capaian kinerja sasaran sebesar **102,33%**.

Untuk mencapai sasaran strategis di atas pada tahun 2018, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan melaksanakan 2 (dua) program yang didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pengelolaan UPT. PLBL Liem Hie Djung;
- Kegiatan Pengelolaan UPT. Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun;
- Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sebatik (Liang Bunyu);
- Kegiatan Pengelolaan UPT Lalu lintas dan Angkutan Kecamatan Sebatik;
- Kegiatan Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Kecamatan Sebuku dan Sembakung; dan

f) Kegiatan Pengelolaan UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya penjelasan IKU Prosentase angkutan darat dan laut yang layak di atas adalah sebagai berikut :

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara jumlah angkutan darat dan laut yang layak dengan Jumlah angkutan darat dan laut. Tahun 2018 jumlah angkutan darat dan laut yang layak adalah **796 (tujuh ratus sembilan puluh enam)** unit angkutan, yang terdiri dari **45 (empat puluh lima)** unit angkutan laut & sungai < 7 GT memiliki sertifikat keselamatan dan **751 (tujuh ratus lima puluh satu)** unit angkutan penumpang umum memiliki Uji KIR. Sedangkan Jumlah angkutan darat dan laut adalah sebanyak **1.037 (seribu tiga puluh tujuh)** unit, yang terdiri dari **265 (dua ratus enam puluh lima)** unit angkutan laut & sungai < 7 GT dan **772 (tujuh ratus tujuh puluh dua)** unit angkutan darat. Sehingga dapat diperoleh realisasi kesesuaiannya sebesar $(796/1037)*100 = 76,75\%$ dari rencana **75%**. Sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar **102,33%**.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir.

Tabel III.6

Sasaran Strategis/IKU		Satuan	Realisasi	
			2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)
Sasaran 2 : Tersedianya moda transportasi yang aman, layak, efisien dan berkelanjutan				
IKU	Prosentase angkutan darat dan laut yang layak	%	75	76,75

Dari uraian tabel III.6 tentang perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja T.A 2018 dengan T.A 2017 disimpulkan bahwa di tahun 2018 Prosentase angkutan darat dan laut yang layak mengalami peningkatan sebesar 1,75% di banding tahun sebelumnya.

Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan 2016-2021.

Tabel III.7

Sasaran Strategis/IKU		Satuan	Target 2021	Realisasi 2018
(1)		(2)	(3)	(4)
Sasaran 2 : Tersedianya moda transportasi yang aman, layak, efisien dan berkelanjutan				
IKU	Prosentase angkutan darat dan laut yang layak	%	100	76,75

Dari uraian tabel III.7 tentang perbandingan antara realisasi kinerja T.A 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan 2016-2021, tergambar bahwa realisasi kinerja tahun 2018 masih terpaut 23,25 persen. Dengan demikian, perlu dilakukan peningkatan kinerja yang lebih besar lagi guna mengejar target di atas pada tahun selanjutnya.

Tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional karena Dinas Perhubungan belum mempunyai Standar Pelayanan Minimal.

- ❖ Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis 2 :
 1. Komitmen pimpinan dan personil dilapangan terhadap program dan kegiatan dalam pelaksanaan;
 2. Kesadaran pemilik usaha angkutan dalam pemenuhan sertifikasi keselamatan dan uji KIR kendaraan.

- ❖ Hambatan/Masalah :
 1. SDM yang memiliki kualifikasi teknis terbatas;
 2. Regulasi terkait pelimpahan kewenangan khususnya masalah keselamatan pelayaran belum jelas;
 3. Dukungan anggaran APBD II terbatas.

- ❖ Strategi / upaya pemecahan masalah :

Strategi dan kebijakan yang diambil terkait kendala yang ada adalah :

 1. Mengajukan usulan penambahan personil yang memiliki kualifikasi teknis ke Kantor BKPSDM Kabupaten Nunukan.
 2. Meningkatkan pengawasan terhadap kelayakan pengoperasian kendaraan/angkutan umum;
 3. Bersurat dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI untuk meminta kejelasan terkait dengan kewenangan daerah di sector keselamatan.
 4. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan;
 5. Melaksanakan sosialisasi keselamatan angkutan penumpang bersama-sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, guna meningkatkan standar keselamatan bagi pengusaha angkutan perairan dan daratan.

❖ Dokumentasi :

A. Pemeriksaan Alat Keselamatan Kapal Di Sembakung



B. Pemeriksaan Alat Keselamatan Kapal Di Lumbis



C. Pemeriksaan Uji KIR Kendaraan Bermotor Di Nunukan



D. Pemeriksaan Uji KIR Kendaraan Bermotor Di Sebuku



- ❖ **Sasaran Strategis 3** : Terciptanya sistem dan jaringan transportasi yang baik dan selaras dengan kebijakan sistem dan jaringan transportasi regional dan nasional serta internasional.

Sasaran strategis “Terciptanya sistem dan jaringan transportasi yang baik dan selaras dengan kebijakan sistem dan jaringan transportasi regional dan nasional serta internasional” merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **Meningkatkan keterjangkauan dan konektivitas pelayanan transportasi terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal; dan Meningkatkan pelayanan transportasi yang aman, handal, terjangkau, tertib dan berkelanjutan.** Sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.

Capaian sasaran “Terciptanya sistem dan jaringan transportasi yang baik dan selaras dengan kebijakan sistem dan jaringan transportasi regional dan nasional serta internasional” tahun 2018 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja TA 2018

Tabel III.8

Sasaran Strategis/IKU		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
(1)		(2)	(3)	(4)	(5=4/3x100)
Sasaran 3 : Terciptanya sistem dan jaringan transportasi yang baik dan selaras dengan kebijakan sistem dan jaringan transportasi regional dan nasional serta internasional.					
IKU	Prosentase keselamatan angkutan darat dan perairan	%	98	79,60	81,22

Dari uraian tabel III.8 tentang perbandingan antara terget dan realisasi kinerja T.A 2018 tergambar bahwa capaian sasaran strategis di atas diukur menggunakan Indikator Kinerja Prosentase keselamatan angkutan darat dan perairan dengan target **98%**. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa realisasi indikator ini hanya sebesar **79,60%**. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran sebesar **81,22%**.

Untuk mencapai sasaran strategis diatas, pada tahun 2018, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan melaksanakan 1 (satu) program yang didukung oleh kegiatan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan, namun kegiatan ini tidak terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa kendala/hambatan sehingga pencapaian tahun ini tidak mengalami peningkatan.

Selanjutnya penjelasan IKU Prosentase keselamatan angkutan darat dan perairan di atas adalah sebagai berikut :

Indikator ini menunjukkan perbandingan jumlah perlengkapan dan fasilitas keselamatan angkutan darat dan perairan berupa rambu-rambu keselamatan dengan jumlah perlengkapan dan fasilitas keselamatan angkutan darat dan perairan yang seharusnya tersedia. Tahun 2018 tidak ada penambahan jumlah rambu-rambu lalu lintas angkutan darat dan perairan yang terpasang. Dengan sendirinya, jumlah rambu yang terpasang masih sama dengan tahun lalu yaitu sebanyak **796 (tujuh ratus sembilan puluh enam)** unit dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebanyak **723 (tujuh ratus dua puluh tiga)** unit, merupakan rambu lalu lintas angkutan darat, dan
2. Sebanyak **73 (tujuh puluh tiga)** unit rambu lalu lintas angkutan perairan.

Adapun jumlah rambu yang seharusnya tersedia adalah sebanyak **1.000 (seribu)** unit, yang terdiri dari :

1. Sebanyak **918 (sembilan ratus delapan belas)** unit rambu lalu lintas angkutan darat, dan
2. Sebanyak **82 (delapan puluh dua)** unit rambu lalu lintas angkutan perairan.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir.

Tabel III.9

Sasaran Strategis/IKU		Satuan	Realisasi	
			2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)
Sasaran 3 : Terciptanya sistem dan jaringan transportasi yang baik dan selaras dengan kebijakan sistem dan jaringan transportasi regional dan nasional serta internasional.				
IKU	Prosentase keselamatan angkutan darat dan perairan	%	79,60	79,60

Dari uraian tabel III.9 tentang perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja T.A 2018 dengan T.A 2017 dan beberapa tahun terakhir, tergambar bahwa di tahun 2018 Prosentase keselamatan angkutan darat dan perairan tidak ada peningkatan capaian dari tahun sebelumnya.

Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan 2016-2021.

Tabel III.10

Sasaran Strategis/IKU		Satuan	Target 2021	Realisasi 2018
(1)		(2)	(3)	(4)
Sasaran 3 : Terciptanya sistem dan jaringan transportasi yang baik dan selaras dengan kebijakan sistem dan jaringan transportasi regional dan nasional serta internasional				
IKU	Prosentase keselamatan angkutan darat dan perairan	%	100	79,60

Dari uraian tabel III.10 tentang perbandingan antara realisasi kinerja T.A 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan 2016-2021, tergambar bahwa realisasi kinerja tahun 2018 masih terpaut 20,40 persen.

Tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional karena Dinas Perhubungan belum mempunyai Standar Pelayanan Minimal.

- ❖ Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis 3 :
 1. Tidak adanya penambahan/pemasangan perlengkapan dan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan darat dan perairan tahun ini ;
 2. Minimnya anggaran, sehingga program dan kegiatan difokuskan pada belanja pemeliharaan dan pengawasan.

- ❖ Hambatan/Masalah :
 1. Dukungan anggaran APBD II terbatas;
 2. Tidak adanya kegiatan pengadaan rambu dan perlengkapan jalan yang bersumber dari anggaran APBD I dan APBN.

- ❖ Strategi / upaya pemecahan masalah:

Strategi dan kebijakan yang diambil terkait kendala yang ada adalah :

 1. Mengajukan usulan pengadaan perlengkapan dan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan darat dan perairan, baik melalui skema penganggaran APBD II, APBD I maupun APBN.
 2. Meningkatkan pengawasan terhadap kelayakan perlengkapan dan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan darat dan perairan guna meminimalisir terjadinya kecelakaan yang terjadi di darat dan perairan.

- ❖ Dokumentasi/Data :

A. Data Rambu Lalu Lintas Angkutan Jalan

NO	JENIS RAMBU	JUMLAH RAMBU								TOTAL	KETERANGAN
		TA. 2011	TA. 2012	TA. 2013	TA. 2014	TA. 2015	TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018		
1	PERINGATAN	30	277	-	-	86	-	-	-	393	Tahun 2017 terdapat penambahan pengadaan rambu LLAJ sebanyak ± 91 Unit melalui dan APBN dan APBD I
2	LARANGAN	4	96	-	-	10	-	-	-	110	
3	PERINTAH	-	18	-	-	-	-	-	-	18	
4	PETUNJUK	6	71	-	-	7	--	-	-	84	
5	RPPJ	-	10	-	12	-	-	-	-	22	
6	CERMIN TIKUNG	-	5	-	-	-	-	-	-	5	
TOTAL		477			12	103		91		723	

Sumber : Bidang Prasarana Perhubungan

B. Data Rambu Lalu Lintas Angkutan Sungai

NO	JENIS RAMBU	JUMLAH RAMBU								TOTAL	KETERANGAN
		TA. 2011	TA. 2012	TA. 2013	TA. 2014	TA. 2015	TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018		
1	Rambu Sungai	-	38	-	35	-	-	-	-	73	
TOTAL										73	

Sumber : Bidang Prasarana Perhubungan

❖ **Sasaran Strategis 4 : Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas di sektor transportasi.**

Sasaran strategis “**Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas di sektor transportasi**” merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **Meningkatkan keterjangkauan dan konektifitas pelayanan transportasi terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal; dan Meningkatkan pelayanan transportasi yang aman, handal, terjangkau, tertib dan berkelanjutan.** Sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Capaian sasaran “**Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas di sektor transportasi**” tahun 2018 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja TA 2018

Tabel III.11

Sasaran Strategis/IKU		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
(1)		(2)	(3)	(4)	(5=4/3x100)
Sasaran 4 : Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas di sektor transportasi					
IKU	Prosentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya.	%	60	56,67	94,45

Dari uraian tabel III.11 tergambar bahwa capaian sasaran strategis di atas diukur dengan menggunakan indikator kinerja Prosentase SDM Sesuai Kebutuhan Tugas dengan target **60,00%**. Adapun realisasi kinerja tercatat sebesar **56,67%** sehingga capaian kinerja sasaran sebesar **94,45%**.

Untuk mencapai sasaran strategis diatas pada tahun 2018, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan melaksanakan 1 (satu) program yang didukung oleh kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, namun kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan beberapa kendala/hambatan sehingga pencapaian target tahun 2018 tidak maksimal.

Selanjutnya penjelasan IKU Prosentase SDM Sesuai Kebutuhan Tugas diatas adalah sebagai berikut :

Indikator ini menunjukkan perbandingan jumlah SDM yang memiliki kualifikasi teknis dengan jumlah SDM yang memiliki kualifikasi teknis yang seharusnya tersedia.

Jumlah total pegawai yang berstatus PNS pada Dinas Perhubungan tahun 2018 tercatat sebanyak 75 orang. Sebanyak 60 orang (80%) merupakan pegawai-pegawai yang ditempatkan pada unit-unit teknis seperti Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas. Dari jumlah ini, sebanyak 37 PNS mendapatkan kesempatan mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan.

Sebanyak 34 orang (56,67%) dari PNS yang mengikuti diklat teknis dimaksud merupakan pegawai teknis.

Selain PNS, Dinas Perhubungan juga berhasil mengikutsertakan puluhan tenaga honorer untuk mengikuti kegiatan-kegiatan diklat tahun 2018 tersebut. Pembiayaan diklat sepenuhnya ditanggung oleh penyelenggara diklat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI. Diklat-diklat dimaksud menjadi cukup penting dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis para peserta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir.

Tabel III.12

Sasaran Strategis/IKU		Satuan	Realisasi	
			2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)
Sasaran 4 : Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas di sektor transportasi				
IKU	Prosentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya.	%	50	56,67

Dari uraian tabel III.12 tentang perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja T.A 2018 dengan T.A 2017 dan beberapa tahun terakhir, tergambar bahwa di tahun 2018 Prosentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya ada peningkatan capaian sebesar 6,67% dibanding tahun sebelumnya.

Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan 2016-2021.

Tabel III.13

Sasaran Strategis/IKU		Satuan	Target 2021	Realisasi 2018
(1)		(2)	(3)	(4)
Sasaran 4 : Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas di sektor transportasi				
IKU	Prosentase SDM Sesuai Kebutuhan Tugas.	%	100	56,67

Dari uraian tabel III.13 tentang perbandingan antara realisasi kinerja T.A 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan 2016-2021, tergambar bahwa realisasi kinerja tahun 2018 masih terpaut 43,33 persen.

Tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional karena Dinas Perhubungan belum mempunyai Standar Pelayanan Minimal.

❖ Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis 4 :

1. Adanya program Pemerintah pusat melalui kementerian teknis melalui menyelenggarakan diklat pemberdayaan masyarakat secara gratis;
2. Kemampuan jajaran pimpinan di lingkungan Dinas Perhubungan untuk meyakinkan penyelenggara diklat guna memberi alokasi peserta yang lebih banyak kepada jajaran Dinas Perhubungan Kab. Nunukan.

Hambatan/Masalah :

1. Dukungan anggaran APBD II terbatas;
2. Biaya diklat teknis non subsidi, kontribusi pembayaran cukup mahal.

Strategi / upaya pemecahan masalah:

Strategi dan kebijakan yang diambil terkait kendala yang ada adalah :

1. Mengajukan usulan peningkatan SDM melalui diklat pemberdayaan masyarakat secara gratis.
2. Mengusulkan anggaran diklat teknis melalui APBD II agar kuota SDM yang memiliki kualifikasi teknis perhubungan dapat terpenuhi.

Dokumentasi/Data :

A. DIKLAT TEKNIS PERHUBUNGAN "BP2TL" JAKARTA





B. DIKLAT TEKNIS PERHUBUNGAN “BP2TD MEMPAWAH” KALIMANTAN BARAT



Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

TABEL III.14

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFESIENSI (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya infrastruktur yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Nunukan terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal	Prosentase ketersediaan pelabuhan laut, sungai dan terminal	80	95,65	119,56	880.000.000,00	845.696.024,33	96,10	124,41
2	Tersedianya moda transportasi yang aman, layak, efisien dan berkelanjutan	Prosentase angkutan darat dan laut yang layak	75	76,75	102,33	437.337.550,00	328.938.878,00	75,21	136,06
3	Terciptanya sistem dan jaringan transportasi yang baik dan selaras dengan kebijakan sistem dan jaringan transportasi regional dan nasional serta internasional	Prosentase keselamatan angkutan darat dan perairan	98	79,60	81,22	1.539.532.500,00	1.363.665.000,00	88,58	91,70
4	Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas di sektor transportasi	Prosentase SDM Sesuai Kebutuhan Tugas	60	56,67	94,45	47.960.000,00	0	0,00	0

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Secara umum Program / Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dinilai baik, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan akan selalu mereview apakah dalam tahun bersangkutan terdapat program kegiatan yang harus segera dilaksanakan mengingat kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang mana kebijakan tersebut sangat sulit diprediksi pada awal-awal tahun.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 14.900.693.096,30** dan rincian penggunaan anggaran hingga akhir tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel III.15

URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp.)	(%)
BELANJA DAERAH	14.603.443.966,90	14.900.693.096,30	13.672.773.068,33	91,76
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.552.204.236,90	6.894.480.956,30	6.595.206.650,00	95,66
• <i>Belanja Pegawai</i>	6.552.204.236,90	6.894.480.946,30	6.595.206.650,00	95,66
BELANJA LANGSUNG	8.051.159.730,00	8.006.212.150,00	7.077.566.418,33	88,40
• <i>Belanja Pegawai</i>	4.189.089.000,00	3.986.577.000,00	3.643.636.000,00	91,40
• <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.879.940.730,00	3.064.977.650,00	2.550.824.894,00	83,22
• <i>Belanja Modal</i>	982.130.000,00	954.657.500,00	883.105.524,33	92,50

Sumber : Simda Keuangan Per 31 Desember 2018 (Subbag. Keuangan Dishub)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp. 13.672.773.068,33** atau **91,76 %**

Untuk Belanja Langsung atau yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana terlihat dalam tabel dialokasikan sebesar **Rp. 8.006.212.150,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 7.077.566.418,33** atau **88,40 %**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan harus didukung dengan anggaran yang memadai, baik jumlahnya maupun kelancaran pencairannya. Pada Tahun Anggaran 2018 sumber dana Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan berasal dari APBD II dan Dana Alokasi Khusus dengan jumlah sebesar **8.006.212.150,00** yang digunakan untuk kegiatan Belanja Rutin Operasional dan Pembangunan (belanja langsung) dan terealisasi sebesar **Rp. 7.077.566.418,33** atau **88,40 %**.

Realisasi Penggunaan Belanja Langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan berdasarkan DPPA/RKAP (Perubahan) terdiri dari **9 (Sembilan) Program** dengan **31 (Tiga Puluh Satu) Kegiatan**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.16

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.724.474.100,00	4.909.615.100,00	4.402.606.633,00	89,67
1	Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	201.970.000,00	202.370.000,00	181.568.347,00	89,72
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.579.500,00	24.579.500,00	23.963.500,00	97,49
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	35.000.000,00	32.214.000,00	10.781.000,00	33,47
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	63.500.000,00	63.500.000,00	59.999.500,00	94,49
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.170.000,00	162.360.000,00	121.570.900,00	74,88
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.223.600,00	6.223.600,00	3.499.100,00	56,22
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.850.000,00	129.875.000,00	53.119.000,00	40,90
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.880.000,00	3.600.000,00	1.680.000,00	46,67
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	23.991.000,00	10.013.000,00	7.355.260,00	73,46
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah	87.150.000,00	138.800.000,00	124.380.026,00	89,61

NO	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%
	11	Penyediaan Jasa Umum Perkantoran	4.157.160.000,00	4.136.080.000,00	3.814.690.000,00	92,23
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		64.996.000,00	101.207.000,00	57.981.774,00	57,29
	12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	64.996.000,00	101.207.000,00	57.981.774,00	57,29
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		50.060.000,00	47.960.000,00	0,00	0,00
	13	Pendidikan dan pelatihan formal	50.060.000,00	47.960.000,00	0,00	0,00
4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		107.728.830,00	50.000.000,00	21.495.500,00	42,99
	14	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	61.628.830,00	50.000.000,00	21.495.500,00	42,99
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		238.539.250,00	65.560.000,00	60.197.000,00	91,82
	15	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	238.539.250,00	65.560.000,00	60.197.000,00	91,82
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		38.955.600,00	25.000.000,00	18.481.109,00	73,92
	16	Penyusunan dokumen perencanaan	38.955.600,00	25.000.000,00	18.481.109,00	73,92
7	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		66.850.000,00	54.542.000,00	48.166.000,00	88,31
	17	Pengelolaan UPT. PKB	66.850.000,00	54.542.000,00	48.166.000,00	88,31
8	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan		544.275.950,00	382.795.550,00	280.772.878,00	73,35
	18	Pengelolaan Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung	208.600.000,00	200.150.000,00	168.105.465,00	83,99
	19	Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun	54.194.050,00	23.131.650,00	15.396.400,00	66,56
	20	Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Liang Bunyu	41.484.000,00	32.484.000,00	20.434.500,00	62,91
	21	Penyelenggaraan Angkutan Darat Bersubsidi	50.800.000,00	27.125.000,00	15.904.000,00	58,63
	22	Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Kec. Sebatik	50.026.400,00	45.566.400,00	27.156.453,00	59,60
	23	Penyelenggaraan Angkutan Perairan Bersubsidi	50.030.000,00	21.880.000,00	18.890.000,00	86,33
	24	Kegiatan Pengelolaan UPT Lalu-Lintas dan Angkutan Kecamatan Sebuku dan Sembakung	50.090.500,00	25.298.500,00	14.886.060,00	58,84

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	%
25	Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Seimenggaris	19.051.000,00	7.160.000,00	0,00	0,00
9	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1.385.280.000,00	1.539.532.500,00	1.363.665.000,00	88,58
26	Pemeliharaan PJU	927.580.000,00	1.257.480.000,00	1.207.135.000,00	96,00
27	Pengadaan Perlengkapan Jalan	27.835.000,00	13.922.500,00	0,00	0,00
28	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	42.400.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00
29	Pengawasan dan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Serta Penanganan Kecelakaan di Perairan	50.040.000,00	61.400.000,00	0,00	0,00
30	Rehabilitasi Perlengkapan Jalan	286.580.000,00	186.430.000,00	156.530.000,00	83,96
10	DAK Afirmasi Bidang Transportasi	830.000.000,00	830.000.000,00	824.200.524,33	99,30
31	Pembangunan tambatan perahu desa labang kec. lumbis ogong (DAK Afirmasi)	830.000.000,00	830.000.000,00	824.200.524,33	99,30

Sumber : Simda Keuangan Per 31 Desember 2018 (Subbag. Keuangan Dishub)

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 4 (empat) sasaran dengan didukung 10 (sepuluh) indikator pencapaian kinerja program, memiliki rata-rata capaian sebesar 77,17%. Dengan mengacu pada 5 (lima) skala yang telah disebutkan sebelumnya, maka kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan pada tahun 2018 termasuk dalam skala dengan predikat **TINGGI**. Keberhasilan yang dicapai Dinas Perhubungan tidak terlepas dukungan dan kerjasama dari seluruh jajaran Dinas Perhubungan, pimpinan dan stakeholders terkait.

Harus diakui bahwa beberapa tantangan dan kendala dihadapi oleh Dinas Perhubungan selama tahun 2018. Namun hal tersebut dapat diatasi melalui antisipasi dan evaluasi secara berkala. Melalui antisipasi dan evaluasi ini, dihasilkan alternative strategi pemecahan. Tantangan dan kendala serta pemecahan masalah yang telah dilakukan juga akan menjadi pelajaran berharga guna meminimalkan dampak negative dari tantangan dan kendala serupa di masa yang akan datang.

4.2 Langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah :

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
- b. Pemenuhan permintaan personil khususnya pegawai negeri sipil untuk penempatan menjadi tenaga teknis yang profesional.
- c. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing personil di unit kerja dalam mengisi jabatan fungsional umum maupun teknis guna meningkatkan kinerja organisasi.
- d. Pemingkatan program / kegiatan prioritas dalam menentukan porsi anggaran untuk meningkatkan target kinerja.
- e. Mengevaluasi program / kegiatan yang kinerjanya kurang maksimal.
- f. Evaluasi dokumen Renstra dan IKU organisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pangeran Antasari RT. 15 No. 44 Telp.(0556) 22834, Fax. (0556) 23204

NUNUKAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDI JAUHARI. N, ST**
Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Hj. ASMIN LAURA HAFID, SE. MM**
Jabatan : **Bupati Nunukan**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nunukan, Februari 2018

Pihak Kedua
Bupati Nunukan,

Pihak Pertama
Kepala Dinas Perhubungan,

Hj. ASMIN LAURA HAFID, SE. MM

ABDI JAUHARI. N, ST
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19780430 200112 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya infrastruktur transportasi yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Nunukan terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal	Prosentase ketersediaan pelabuhan Laut, Sungai dan terminal	80%
2	Tersedianya moda transportasi yang aman, layak, efisien, dan berkelanjutan	Prosentase Angkutan darat dan laut yang layak	75%
3	Terciptanya sistem dan jaringan transportasi yang baik dan selaras dengan kebijakan sistem dan jaringan transportasi regional dan nasional serta internasional	Prosentase keselamatan angkutan darat dan perairan	98%
4	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas di sektor transportasi	Prosentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan Fungsinya.	60%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	: Rp 107.728.830,00	
2. DAK Afirmasi Bidang Transportasi	: Rp 830.000.000,00	
3. Peningkatan Pelayanan Perhubungan	: Rp 544.275.950,00	
4. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	: Rp 66.850.000,00	
5. Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	: Rp 1.385.280.000,00	
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	: Rp 50.060.000,00	
Total	: 2.984.194.780,00	

Nunukan, Februari 2018

Bupati Nunukan,



Hj. Asmin Laura Hafid, SE. MM

Kepala Dinas Perhubungan,



Abdi Jauhari. N, ST

Pembina TK.I, IV/b

NIP. 19780430 200112 1 003